

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks)**

OLEH

ANDI NURSATANGGI M

B111 11 101

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2015

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)**

PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks)

ANDI NURSATANGGI M

B111 11 101

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Acara**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NURSATANGGI M

B111 11 101

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 12 Februari 2015
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris

Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

NAMA : ANDI NURSATANGGI M

NOMOR INDUK : B 111 11 101

BAGIAN : HUKUM ACARA

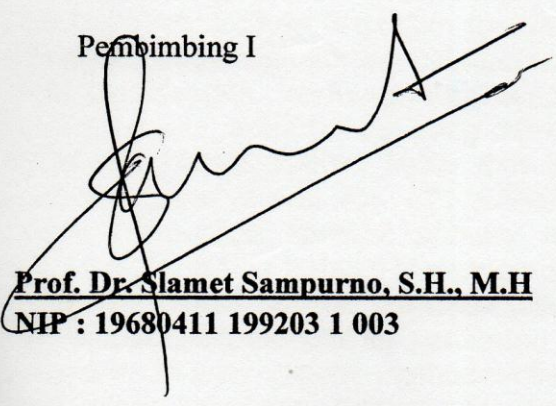
JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging)
Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan
No.337/Pid.B/2011/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

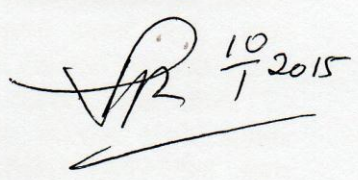
Makassar, 7 Januari 2015

Mengetahui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H
NIP : 19680411 199203 1 003

Pembimbing II


Hj. Haeranah, S.H., M.H
NIP : 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **ANDI NURSATANGGI M.**

No. Pokok : B111 11 101

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) pada Tindak Pidana Penipuan
(Studi Kasus Putusan Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Hamadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

ANDI NURSATANGGI M (B111 11 101), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B./2011/PN.Mks)” dibawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman dan Mengkaji serta membandingkan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B./2011/PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871/K/Pid/2012

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 337/Pid.B./2011/PN.Mks, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) tidak tepat dan keliru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan secara baik dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memahami unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga mencampur adukkan penipuan dari segi hukum perjanjian (perdata) dengan penipuan dari segi hukum pidana dan keliru menjadikan perjanjian (perdata) sebagai suatu perikatan yang dibangun pelaku dan korban sebagai alasan pembenar. Selain itu fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti yang ada, serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, keliru dan terburu-buru dalam memutus. 2) Dalam putusan kasasi No. 871 K/Pid/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara No. 337/Pid.B./2011/PN.Mks dan memutus Terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana penipuan. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal 378 KUHP “rangkaiaan kata-kata bohong” yang dilakukan oleh para Terdakwa dan

kerugian yang dialami oleh PT. Rodamas Baja Inti. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi ahli, alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keihklasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks)”**

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, adapun kekurangan dan ketidaksempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **AKBP (Purn) H. Andi Makkaraja, S.H** dan Ibunda **Hj. Andi Basse Nyompa Djalil, BA** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis.

Terima kasih kepada adinda-adinda tercinta **Andi Nur Annisa M** dan **Andi Reski Nur Fatimah M** sebagai adik-adik penulis.

Terima Kasih pula kepada paman penulis **Andi Wahyudin Djalil S.H, M.H** sebagai guru non-formal penulis yang bersedia membagi ilmu kepada penulis.

Serta terima kasih pula kepada paman dan bibi penulis **Hj. Andi Rospia Djalil, Andi Rosniar Djalil, S.Pd, Andi Murniati Djalil, Andi Naneng** dan **Andi Azhari Djalil, S.Pd** selaku ayah dan ibu kedua bagi penulis atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** beserta para Pembantu Rektor.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Haeranah, S.H., M.H** selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H**, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H**, dan bapak **M. Imran Arief, S.H., M.Si**, selaku

penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, staf Pengadilan Negeri Makassar Bapak **Mustari, S.H**, Bapak **Nathan Lambe S.H., M.H** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman **ALSA LC UNHAS PERIODE 2012-2013** yang telah memberikan nuansa persaudaraan yang hangat, pengalaman berorganisasi yang luar biasa dan gudang ilmu bagi penulis yang tidak akan terhitung harganya.
8. Kepada teman-teman tim **National Moot Court Competition 2012 Malang** yang telah memberikan pengalaman berkompetisi, ilmu dalam beracara dan persaudaraan yang terjalin erat tidak akan dilupakan penulis.
9. Kepada teman-teman pengurus **Badan Eksekutif Mahasiswa FH-UH periode 2011-2012** yang telah memberi pelajaran dalam membangun leadership dan tanggung jawab bagi penulis.

10. Kepada teman-teman pengurus **Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) periode 2012-2013** yang telah menjadi tempat menggali ilmu dan mempunyai kesan tersendiri bagi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik DQn **Isti Aprianti Arief, Andi Satriani Safitri, Andi Nurlailiah Hamdiyani** dan **Imelda Purnamasari** yang selalu memotivasi penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis sangat berterima kasih atas kehadirannya dalam hari-hari penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan **Indo Padang, Lestari Sainuddin, Ainil Ma'sura, Israyani, Iis Ariska, Wahyuni Zakaria, Andi Atika, Nur Alimah Zainudin, Nurul Hikma, Reski Dian Utami, Fitriani Irianti, Nadia Ananda Elsanti** dan **Siti Nirah** yang selalu membantu serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis, penulis sangat berterima kasih atas semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman terbaik **Retno Annisa, Hardiyanti, Fatimah Wardah, Abriani, Diawan, Fauzi** dan **Angga Wilantara** yang bersama-sama berjuang dan memberi semangat kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
14. Special thanks to **Rohandi** yang telah membantu, memberi semangat, dan selalu ada dalam hari-hari penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman KKN Reguler Gelombang 87 Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone **Mashyta Dwi Patiwi, Dahniar Amarullah, Tiqa Reski Hado, Muh Rahman Nur, Rahmat, Robby Raymond, Vico Reynolds Bangun** dan teman-teman Kel. Panyula, penulis sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada seluruh teman-teman **Mediasi angkatan 2011** yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Putusan.....	12
1. Pengertian Putusan.....	12
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	13
3. Syarat Sah dan Isi Putusan.....	18
B. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Pembuktian	20
2. Macam-Macam Alat Bukti.....	21
C. Penipuan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	28
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	

A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap kasus No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks.....	39
1. Posisi Kasus	39
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
4. Pertimbangan Hakim.....	61
5. Amar Putusan.....	75
6. Analisis Penulis.....	76
B. Perbandingan Putusan Lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan Vonis yang Dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012.....	81
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	81
2. Amar Putusan.....	92
3. Analisis Penulis	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.¹

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.²

Haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan merupakan kesewenang-wenangan dan kebobrokan moral. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai keadilan sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum

² Ibid.

Dari sisi hukum, dibeberapa perkara lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Keadilan hanya dapat dipahami jika ia diposisikan dalam keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Dengan demikian hukum di negara kita dijadikan suatu

³ Carl Joachim Friedrich. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung : Nuansa dan Nuansa Media. Hlm. 239. Dalam Ahmad Zaenal Fanani. Makalah dengan judul Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. Diakses di www.badilag.net

kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dimana penegakan hukum acara pidana juga harus ditegakkan.

Seperti kita ketahui tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai berikut

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Selain itu bahwa hukum acara pidana harus bisa membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk menjaga

agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petugas-petugas hukum maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dibenarkan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta

memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁴

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menanjak naik di bidang sosial, ekonomi dan politik. Kemajuan sebuah negara sering berbanding lurus dengan kemajuan tingkat kriminalitasnya pula. Negara Indonesia sebagai negara berkembang sejalan dengan semakin maraknya tindak kriminalitas yang terjadi karena distorsi budaya dan krisis moral. Adanya pergeseran norma-norma yang ada didalam masyarakat ini, karena adanya kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dikesampingkan sehingga moral semakin merosot akibatnya aturan hukum mulai terkikis.

Berbagai macam kejahatan diberitakan setiap detiknya diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Berbagai macam kejahatan yang tidak ada jedaunya sebagai bukti ada yang salah dalam proses kemajuan bangsa ini. Ditengah riuhnya berita yang mengabarkan meningkatnya nilai rupiah sampai kepada kemiskinan yang konon katanya telah mengalami *fluktuasi*, nilai dan moral didalam masyarakat mulai diindahkan. Kemerosotan nilai dan moral tersebut rupanya bukan lagi

⁴ Oemar Seno Aji, 1984, Hukum Hakim Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12.

fenomena yang dirasa serius didalam masyarakat, bahkan terkadang dianggap biasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu izin dikantor dengan alasan sakit padahal faktanya tidak. Hal demikian sudah dianggap lumrah dalam masyarakat. Namun, ada satu yang dilupakan, bahwa kemerosotan moral tersebut dapat berimplikasi terhadap kemerosotan norma-norma didalam masyarakat apabila dilakukan secara lumrah dan dianggap biasa. Pada akhirnya, bukan saja aturan-aturan kecil yang diacuhkan, namun akan berembes pada aturan hukum tertulis sehingga semakin marak terjadi kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan

diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵

Modus-modus penipuan tidak terlepas dari unsur kesengajaan dan unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Kasus penipuan telah banyak terjadi baik di kota besar maupun di kota kecil. Makassar salah satu kota yang tidak luput dari jeratan tindak kejahatan penipuan. Hampir setiap tahunnya berbagai laporan dari korban yang merasa ditipu membanjiri polsek / Polres kota Makassar. Salah satu kasus penipuan yang terjadi di kota Makassar adalah penipuan yang dilakukan oleh Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman yang merupakan para pemilik / pengendali PT. Asindo Indah Griyatma, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT. Karunia Sukses Sejati, PT. Margamas Development, dan PT. Baja Mas Mulia Development, memerlukan besi beton dalam jumlah banyak guna pembangunan proyek barunya di Mall Panakkukang Makassar. Untuk memenuhi kebutuhan besi tersebut Jhon Lucman dan Ir. Frans Tunggono bekerjasama dengan David Gautama pemilik

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

perusahaan beton PT. Rodamas Baja Inti. John Lucman menyuruh Joseph Lucman yang mewakili keluarga Lucman dalam hal membujuk David Gautama agar mau bekerja sama dalam hal memasok beton karena sebelumnya David Gautama tidak bersedia memasok beton namun, berkat negosiasi Joseph Lucman yang meyakinkan keluarga Gautama bahwa besi beton akan dibayar tepat waktu serta mengiming-iming akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran serta buka 1,5 % perbulan, dan sebagai sarana untuk memberi keyakinan kepada David Gautama, Joseph Lucman akan membuat draft perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayaran. Hingga pada klimaks kasus ini, Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman tidak memenuhi persyaratan yang diajukan dengan beberapa kali mengecewakan keluarga Lucman sehingga PT. Rodamas Baja Inti mengalami kerugian. Ternyata, 7 buah tanah yang diserahkan sebagai kompensasi yang sebenarnya diketahui tanah-tanah tersebut dalam sengketa, namun, Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman tidak memberitahukan status tanah tersebut. Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman juga melakukan kebohongan lain dengan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek tetapi tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup serta 4 (empat) Bilyet Giro yang juga tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Sehingga kasus ini di layangkan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Register Perkara 337/Pid.B/2011/PN.Mks, namun setelah diputus lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri

Makassar karena dianggap kasus tersebut bukan suatu tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar mengajukan Kasasi yang disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Setelah upaya hukum Kasasi No. 871K/Pid/2012 diputus, Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman di vonis 3 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana **“Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan”** putusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks. Pihak Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman yang merasa tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung, melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, namun PK yang dilayangkan Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman ditolak oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian singkat kasus posisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman ?

2. Bagaimana perbandingan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman.
- b. Untuk Mengkaji dan membandingkan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana penipuan, serta untuk mengkaji dari sisi hukum tentang dasar

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perkara penipuan dan bagaimana perbandingan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/ PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktek* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum Fockema Andrea mengartikan kata “putusan” (*Vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁶

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHP yang berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁶ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 406.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHP yaitu :

a. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak

- dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
 - c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁷

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

⁷ M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348.

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁸

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- i. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata
- ii. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP⁹

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:¹⁰

1. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHP)
2. Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksud di atas, penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur Pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat

⁸ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 1982, Penerbit: Simplex Jakarta, Jakarta, hlm. 82.

⁹ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152-153.

ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).¹¹

Mengenai putusan lepas dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana (penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP).¹²

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP mengatakan bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

¹¹ Ibid.

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas->.

tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.

Dalam kasus yang diputus lepas sering kali didalam putusan tersebut terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Uraian mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah sebagai berikut:

- Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana , namun ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pemaaf dan dapat pula sebagai alasan pembenar. Contoh perbuatan yang dapat menjadi alasan pemaaf ialah karena terganggu kejiwaan (hal ini menjadi alasan pemaaf karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya).
- Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Artinya, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembenar dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa) dan Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang).

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pembedanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP yang berbunyi :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pembedanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

3. Syarat Sah dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan. Surat putusan pembedanaan menurut Pasal 197 ayat

1. KUHAP ini memuat :

- b. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- c. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- e. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- f. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- g. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan Pasal peraturan

¹³ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 1982, Penerbit: Simplex Jakarta, Jakarta, hlm. 82.

perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

- h. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- i. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- j. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- k. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- l. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- m. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l Pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP:

- a. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.
- b. Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Dari ketentuan Pasal 195 dan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah:
 - 1) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)
 - 2) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP).

B. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁴

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b) Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman
- c) Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP¹⁵

¹⁴ Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2003, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273-274.

2. Macam-macam Alat Bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Berikut adalah uraian mengenai alat bukti diatas:

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu". Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

¹⁶ Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- d) Syarat formil : bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
- e) Syarat material : bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (Unus Testis Nulus Testis). Akan tetapi keterangan seorang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.¹⁷

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan". Pasal 186 KUHAP menyatakan :

"Keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan

¹⁷ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 135-136.

tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP. Adapun ahli yang dimaksud dalam Pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.¹⁸

¹⁸ Ibid, hlm. 141.

c. Surat

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut : surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 6) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 7) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- 8) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- 9) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

d. Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk seperti tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) keterangan saksi
- b) surat
- c) keterangan terdakwa

Dalam Pasal 188 ayat (3) disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu

dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya".

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) yaitu : "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.¹⁹

C. Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

¹⁹ Ibid, hlm. 145.

a) Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁰

b) Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh R. Soesilo sebagai berikut :²¹

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun

²⁰ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

²¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 26.

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka pengertian penipuan bahwa :²²

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Dari pengertian penipuan diatas dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah segala cara yang digunakan dengan cara memakai kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk suatu tujuan yang dapat menguntungkan diri sendiri.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk*²³ atau suatu *nasste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan,, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuanyang dalam bentuk

²² R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397.

²³ P.A.F Lamintang, Hukum, 1986, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kedua, Armico, Bandung, hlm. 109.

pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Unsur subjektif
Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif
 1. Barangsiapa
 2. Menggerakkan orang lain agar:
 - Menyerahkan suatu benda
 - Mengadakan suatu perikatan utang
 - Meniadakan suatu piutang
 3. Dengan memakai:
 - Sebuah nama palsu
 - Suatu sifat palsu
 - Tipu muslihat
 - Rangkaian kata-kata bohong

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti diatur dalam Pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa terdakwa:²⁶

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa
- b. Terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa.

Bertolak dari paham bahwa inti pengertian *opzet* atau kesengajaan adalah *willens en wetens* yang artinya menghendaki dan

²⁴ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, hlm. 151.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, hlm. 151-152.

mengetahui sedang yang dikehendaki itu hanyalah dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud diatas, disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :²⁷

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242.

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

- c. Mengetahui bahwa yang ia lakukan untuk menggerakkan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu perikatan.
- d. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut.²⁸

- Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas

²⁸ R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242.

kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa : ²⁹

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Setelah unsur kesengajaan pelaku itu dapat dibuktikan, hakim masih harus memeriksa apakah benar bahwa terdakwa itu memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan yang oleh jaksa telah didakwakan terhadap terdakwa tersebut. ³⁰

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud diatas, dengan sendirinya hakim harus dapat memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada masing-masing unsur yang bersangkutan, baik menurut undang-undang, menurut yurisprudensi maupun menurut doktrin.

Unsur subjektif dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah *met het oogmerk om zich of een ander wederrechtlijk te bevoordelen* atau dengan maksud untuk

²⁹ Ibid, hlm. 245.

³⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, hlm. 153.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah barangsiapa.³¹

Unsur objektif kedua dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

- a. mau menyerahkan suatu benda.
- b. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :³²

- b. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- c. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- d. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 1. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 2. Sipenipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka

³¹ Ibid, hlm. 159.

³² Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

D. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. Pertimbangan-pertimbangan hukum inilah yang akan dijadikan acuan terhadap putusan hakim nantinya apakah putusan tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa atau hal-hal yang meringankan terdakwa kesemuanya merupakan peranan tanggung jawab hakim dalam penjatuhan keputusan.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Alkostar, sebagai figur sentral para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional. Dengan adanya

kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dapat memutuskan suatu perkara dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar.³³

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang dirasa adanya kejanggalan yang menyebabkan matinya akal sehat, putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan.

³³ M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85-86.

Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.³⁴

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:³⁵

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang berat dan tugas yang tidak mudah karena tugas seorang hakim adalah memutus suatu perkara yang dapat menentukan apakah seorang terdakwa bersalah. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan karena menyangkut nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.

³⁴ Ibid, hlm. 86.

³⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar dan khusus membahas mengenai kasus putusan No. 337/Pid.B/2011/ PN.Mks. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas terdakwa kasus penipuan atas nama Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman dan untuk mengkaji serta membandingkan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/ PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871/K/Pid/2012.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data mengenai putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/ PN.Mks dan putusan Mahkamah

Agung No. 871/K/Pid/2012 yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni :

1. Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (interview) langsung kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.
2. Penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif yaitu uraian

menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap kasus Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks terdakwa dalam kasus ini bernama Ir. Frans Tunggono dan JhonLucman. terdakwa II John Lucman bersama sama dengan Joseph Lucman, Benny Lucman, James Lucman dan terdakwa I Ir. Frans Tunggono (yang merupakan saudara ipar dari terdakwa II), adalah para pemilik / Pengendali PT.-Asindo Indah Griyatama, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT. Karunia Sukses Sejati, PT. Margamas Development, dan PT. Bajamas Mulia Development, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya dikawasan Panakkukang Makassar. Untuk memenuhi besi beton untuk proyek barunya tersebut, maka pada tanggal 15 September 2004 Josep Lucman mewakili keluarga Lucman datang menemui saksi korban David Gautama selaku Direktur PT. Rodamas Baja inti yang mempunyai bisnis besi beton. Josep Lucman dengan mengatas namakan saudara seiman membujuk rayu David Gautama agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga Lucman dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti. Semula

David Gautama tidak percaya karena belum pernah berhubungan bisnis dengan keluarga Lucman sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga Lucman, akan tetapi terdakwa II John Lucman menyuruh Yoseph Lucman untuk membujuk agar David Gautama dapat menyediakan kebutuhan besi beton itu untuk pembangunan proyek Carrefour & Hypermart Panakkukang, yang mana merupakan perusahaan dari Prancis dan pasti akan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga jangan takut kalau tidak akan dibayar besi tersebut. Untuk lebih meyakinkan keluarga Gautama bahwa besi beton akan dibayar dengan tepat waktu Joseph Lukman juga menjanjikan / mengiming-iming akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5 % per bulan, dan sebagai sarana untuk memberi keyakinan kepada David Gautama tersebut, Josep Lucman akan membuat Draft Perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayaran.

Setelah satu bulan kemudian, terdakwa II John Lukman menyuruh terdakwa I Ir. Frans Tunggodo (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi Teddy Gautama untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pemesanan besi beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara Joseph Lucman dengan David Gautama. Saksi korban David Gautama yang semula tidak percaya dengan terdakwa I Ir. Frans Tunggono, kemudian menghubungi Joseph Lucman untuk menanyakan mengapa yang datang adalah terdakwa I Ir. Frans Tunggono, lalu Joseph Lucman

meyakinkan saksi David Gautama bahwa perusahaan terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA dan jika timbul masalah mereka terdakwa II Jhon Lucman yang akan bertanggung jawab, karena proyek pembangunan Carrefour & Hypermart Panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga Lucman.

Pada akhirnya saksi korban David Gautama tergerak hatinya atas bujuk rayu dan iming-iming dari Joseph Lucman yang berhasil meyakinkan saksi korban David Gautama, sehingga saksi korban percaya dan menyetujui disusunnya kontrak penjualan besi beton dan wiremesh dan dilakukan pengiriman sesuai jawal yang ditetapkan. Adapun surat perjanjian jual beli Nomor : 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan saksi Teddy Gautama yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran DP 30 % dari total pembefian, kemudian DP 30 % dipotong 10 % dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7 x 270 m2 type Paris yang berada di Golden Park Panakkukang Mas ;
- b. DP 30 % dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan ;
- c. Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama

3 (tiga) bulan setelah surat perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI ;

- d. Terdakwa I Ir. Frans Tunggono akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Pebruari 2005 ;

Setelah pengiriman besi dilakukan sesuai pesanan dengan total harga : Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :

- a. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
- b. Tanggal 20 April'2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
- c. Tanggal IOJuni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- d. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- e. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
- f. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- g. Tanggal 20 juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- h. h. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- i. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek masing masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

dengan total Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

j. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Pembayaran yang dilakukan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI ini hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30 % sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli besi beton tersebut dari total pembelian sebesar Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp.9.725.027.573,- (Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya , untuk semakin membangun kepercayaan pada keluarga Gautama, Joseph Lucman bersama-sama dengan terdakwa II John Lucman membujuk rayu dengan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga Joseph Lucman bersama-sama dengan terdakwa II John Lucman menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh bidang tanah tersebut. Namun karena Joseph Lucman maupun terdakwa II John Lucman sengaja tidak memberitahukan kepada David Gautama bahwa tanah tersebut sedang

dalam perkara, maka David Gautama menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 melalui Chandra, SH membuat dan menandatangani surat perjanjian pembelian tanah No. 033/AIG/SPPT/IV/2005 dengan saksi Teddy Gautama.

Untuk dapat lebih membangun-kepercayaan keluarga Gautama, terdakwa Ir. FRANS TUNGGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan nilai masing masing, Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu cek No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, Cek No. XM 1555333 tanggal 20 Mei 2005, Cek No.XM 1555334 tanggal 30 Mei 2005, akan tetapi saksi korban hendak mencairkan cek-cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak BCA karena saldo tidak cukup. Demikian pula 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, yaitu BG no. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- BG no. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- BG no. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- BG no. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004,- juga tidak dapat dicairkan oleh saksi korban, karena tidak ada dananya.

Dari pihak Roda Mas Baja Inti pernah dua kali mencoba mencairkan cek dan Bilyet Giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan.

Pada bulan Mei 2007, CHANDRA dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI

yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata, ditingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas PT. RODAMAS BAJA INTI merasa tertipu karena pada saat itu baru mengetahui bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang diserahkan kepada PT. RODAMAS MAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP ternyata dalam sengketa/bermasalah, padahal sebelumnya sewaktu perjanjian tidak pernah disebutkan kalau tanah tersebut bermasalah. Apabila terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO atau terdakwa II JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI memberitahu bahwa tujuh bidang tanah tersebut dalam sengketa/ bermasalah, maka jelas PT. RODAMAS BAJA INTI tentu tidak akan mau menerima dan membuat perjanjian penyerahan tanah tersebut

Karena terdakwa Ir. FRANS TUNGGONO dan terdakwa II JOHN LUCMAN tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan sejak jatuh tempo pembayaran DP yakni tanggal 27 Pebruari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut akan tetapi terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO melemparkan tanggung jawab

kepada terdakwa II JOHN LUCMAN karena ini sesungguhnya terdakwa II JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN mengatakan agar menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN.

Selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut-turut yakni :

- a. Bertempat dikolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan surat perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh terdakwa I Ir. FRANS TUNGONO tetapi saksi BENNY LUCMAN menyatakan agar supaya saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair ;
- b. Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran

pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dan Singapura akan membeli saham saham dan mereka ;

- c. Ketiga kalinya bertemu di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN meminta agar bersabar karena kredit yang diajukan di Bank Ekonomi akan segera terealisasi; Keempat kalinya saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama sama dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari terdakwa I JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh. pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang-hutang tersebut, akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi.

Selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan Oktober 2007 atau bulan November 2007 mengadakan pertemuan dengan terdakwa II JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut dimana pada pertemuan tersebut saksi BENNY LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (terdakwa II JOHN LUCMAN, terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, saksi BENNY LUCMAN dan JAMES LUCMAN) adalah satu grup/satu suara dan selanjutnya terdakwa II JOHN LUCMAN menambahkan bahwa besi beton

yang digunakan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI untuk membangun Carrefour dan Hypermart adalah juga sama merupakan milik terdakwa II JOHN 'LUCMAN namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan ;

Dengan demikian, perbuatan terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO dan terdakwa II JOHN LUCMAN yang melakukan bujuk rayu agar PT. RODAMAS BAJA INTI memberikan besi beton dan wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN, perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menyuruh terdakwa I FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang isinya janji janji untuk membuat saksi korban percaya dan yakin, perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahumya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi & wiremesh, dan perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan suatu rangkaian kebohongan para terdakwa demi untuk meyakinkan saksi korban agar mau memenuhi kebutuhan besi. akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, terdakwa II. John Lucman bersama sama dengan Benny Lucman, Chandra dan Joseph Lucman (dalam berkas terpisah) pada bulan September 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo 211 Makassar dan Jalan Letjen Hertasning No. 4 Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II John Lucman bersama sama dengan Joseph Lucman, Benny Lucman, James Lucman dan terdakwa I Ir. Frans Tunggono (yang merupakan saudara ipar dari terdakwa II), adalah para pemilik / Pengendali PT.- Asindo Indah Griyatama, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT. Karunia Sukses Sejati, PT. Margamas Development, dan PT. Bajamas Mulia Development, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya di kawasan Panakkukang Makassar;
- Bahwa, untuk memenuhi besi beton untuk proyek barunya tersebut maka pada tanggal 15 September 2004 Josep Lucman mewakili keluarga Lucman datang menemui saksi korban David Gautama selaku Direktur PT. Rodamas Baja inti yang mempunyai bisnis besi beton. Josep Lucman dengan mengatas namakan saudara seiman membujuk rayu David Gautama agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga Lucman dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti;
- Bahwa semula David Gautama tidak percaya karena beium pernah berhubungan bisnis dengan keluarga Lucman sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga Lucman, akan tetapi terdakwa II John Lucman menyuruh Yoseph Lucman untuk membujuk agar David Gautama dapat menyediakan kebutuhan besi beton itu untuk pembangunan proyek Carrefour & Hypermart Panakkukang, yang mana merupakan perusahaan dari Prancis dan pasti akan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga jangan takut kalau tidak akan dibayar besi tersebut;

Bahwa untuk lebih meyakinkan keluarga Gautama bahwa besi beton akan dibayar dengan tepat waktu Joseph Lukman juga menjanjikan / mengiming-iming akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5 % per bulan, dan sebagai sarana untuk memberi keyakinan kepada David Gautama tersebut, Josep Lucman akan membuat Draft Perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayaran ;

- Bahwa satu bulan kemudian, terdakwa II John Lukman menyuruh terdakwa I Ir. Frans Tunggodo (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi Teddy Gautama untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pemesanan besi beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara Joseph Lucman dengan David Gautama. Saksi korban David Gautama yang semula tidak percaya dengan terdakwa I Ir. Frans Tunggono, kemudian menghubungi Joseph Lucman untuk menanyakan mengapa yang datang adalah terdakwa I Ir. Frans Tunggono, lalu Joseph Lucman meyakinkan saksi David Gautama bahwa perusahaan terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA dan jika timbul masalah mereka terdakwa II Jhon Lucman yang akan bertanggung jawab, karena proyek pembangunan Carrefour & Hypermart Panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga Lucman.
- Bahwa oleh karena saksi korban David Gautama tergerak hatinya atas bujuk rayu dan iming-iming dari Joseph Lucman yang berhasil meyakinkan saksi korban David Gautama, sehingga saksi korban percaya dan menyetujui disusunnya kontrak penjualan besi beton dan wiremesh dan dilakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun surat perjanjian jual beli Nomor : 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan saksi Teddy Gautama yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dipotong 10 % dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7 x 270 m2 type Paris yang berada di Golden Park Panakkukang Mas ;
 - b. DP 30 % dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan
 - c. DP 30 % dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan ;
 - d. Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bulan setelah surat perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI

- e. Terdakwa I Ir. Frans Tunggono akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Pebruari 2005
- f. Setelah pengiriman besi dilakukan sesuai pesanan dengan total harga : Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua miliyad empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :
 - a. Pembayaran DP 30 % dari total pembefian, kemudian DP 30 %
 - a. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliyad rupiah)
 - b. Tanggal 20 April'2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliyad rupiah)
 - c. Tanggal IOJuni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - d. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - e. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
 - f. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - g. Tanggal 20 juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - h. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - i. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek masing masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 1.250.000.000,- (satu miliyad dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - j. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI ini hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30 % sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli besi beton tersebut dari total pembelian sebesar Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua miliyad empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp.9.725.027.573,- (Sembilan miliyad tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya , untuk semakin membangun kepercayaan pada keluarga Gautama, Joseph Lucman bersama-sama dengan terdakwa II John Lucman membujuk rayu dengan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga Joseph Lucman bersama-sama dengan terdakwa II John Lucman menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat

bebas terhadap ketujuh bidang tanah tersebut. Namun karena Joseph Lucman maupun terdakwa II John Lucman sengaja tidak memberitahukan kepada David Gautama bahwa tanah tersebut sedang dalam perkara, maka David Gautama menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 melalui Chandra, SH membuat dan menandatangani surat perjanjian pembelian tanah No. 033/AIG/SPPT/IV/2005 dengan saksi Teddy Gautama ;

- Bahwa untuk dapat lebih membangun-kepercayaan keluarga Gautama, terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan nilai masing masing, Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu cek No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, Cek No. XM 1555333 tanggal 20 Mei 2005, Cek No.XM 1555334 tanggal 30 Mei 2005, akan tetapi saksi korban hendak mencairkan cek-cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak BCA karena saldo tidak cukup ; Demikian pula 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, yaitu BG no. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- BG no. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- BG no. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- BG no. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004,- juga tidak dapat dicairkan oleh saksi korban, karena tidak ada dananya ;
- Bahwa dari pihak Roda Mas Baja Inti pernah dua kali mencoba mencairkan cek dan Bilyet Giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan ;
- Bahwa pada bulan Mei 2007, CHANDRA dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata, ditingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas PT. RODAMAS BAJA INTI merasa tertipu karena pada saat itu baru mengetahui bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang diserahkan kepada PT. RODAMAS MAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP ternyata dalam sengketa/bermasalah, padahal sebelumnya sewaktu perjanjian tidak pernah disebutkan kalau tanah tersebut bermasalah. Apabila terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO atau terdakwa II JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI memberitahu bahwa tujuh bidang tanah tersebut dalam sengketa/ bermasalah, maka jelas PT. RODAMAS

BAJA INTI tentu tidak akan mau menerima dan membuat perjanjian penyerahan tanah tersebut;

- Bahwa karena terdakwa Ir. FRANS TUNGGONO dan terdakwa II JOHN LUCMAN tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan sejak jatuh tempo pembayaran DP yakni tanggal 27 Pebruari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut akan tetapi terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO melemparkan tanggung jawab kepada terdakwa II JOHN LUCMAN karena ini sesungguhnya terdakwa II JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN mengatakan agar menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN ;
- Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut-turut yakni :
 - a. Bertempat dikolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan surat perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO tetapi saksi BENNY LUCMAN menyatakan agar supaya saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair ;
 - b. Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dan Singapura akan membeli saham saham dan mereka;
 - c. Ketiga kalinya bertemu di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN meminta agar bersabar karena kredit yang diajukan di Bank Ekonomi akan segera terealisasi; Keempat kalinya saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama sama dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari terdakwa li JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN di daerah Malang, Jawa Fimur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi

beton dan wiremesh. pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang-hutang tersebut, akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi ;

- Bahwa selanjutnya dan' pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan Oktober 2007 atau bulan November 2007 mengadakan pertemuan dengan terdakwa II JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut dimana pada pertemuan tersebut saksi BENNY LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (terdakwa II JOHN LUCMAN, terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, saksi BENNY LUCMAN dan JAMES LUCMAN) adalah satu grup/satu suara dan selanjutnya terdakwa II JOHN LUCMAN menambahkan bahwa besi beton yang digunakan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI untuk membangun Carrefour dan Hypermart adalah juga sama merupakan milik terdakwa II JOHN LUCMAN namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO dan terdakwa II JOHN LUCMAN yang melakukan bujuk rayu agar PT. RODAMAS BAJA INTI memberikan besi beton dan wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN, perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menyuruh terdakwa I FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang isinya janji janji untuk membuat saksi korban percaya dan yakin, perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahumya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi & wiremesh, dan perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan suatu rangkaian kebohongan para terdakwa demi untuk meyakinkan saksi korban agar mau memenuhi kebutuhan besi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh Sembilan milyard rupiah) ;
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP ;

Atau KEDUA :

- Bahwa terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, terdakwa II JOHN LUCMAN bersama sama dengan BENNY LUCMAN, CHANDRA dan JOSEPH LUCMAN (dalam berkas terpisah) pada bulan September 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 211 Makassar dan jalan

Letjen Hertasning No. 4 Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II JOHN LUCMAN bersama sama dengan JOSEPH LUCMAN, BENNY LUCMAN, JAMES LUCMAN, dan terdakwa II Ir. FRANS TUNGGONO (yang merupakan ipar dari terdakwa II) adalah para pemilik/ pengendali PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak Perusahaan seperti PT. KARUNIA SUKSES SEJATI, PT. MEGAMAS DEVELOPMENT, dan PT. BAJAMAS MULIA DEVELOPMENT, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya di kawasan Panakkukang Makassar ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan besi beton untuk proyek barunya tersebut, maka pada tanggal 15 September 2004 JOSEPH LUCMAN mewakili keluarga LUCMAN datang menemui saksi korban DAVID GAUTAMA selaku Direktur PT. RODAMAS BAJA I NT I yang mempunyai bisnis besi beton, agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti ;
- Bahwa semula DAVID GAUTAMA tidak percaya karena belum pernah berhubungan bisnis dengan keluarga LUCMAN sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga LUCMAN, namun terdakwa II JOHN LUCMAN menyuruh JOSEPH LUCMAN tetap menghubungi DAVID GAUTAMA agar dapat menyediakan kebutuhan besi beton dan wiremesh tersebut untuk pembangunan proyek Carrefour & hypermart Panakkukang ;
- Bahwa JOSEPH LUCMAN dan terdakwa II JOHN LUCMAN juga akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5 % perbulan, dan JOSEPH LUCMAN akan membuat draft perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayarannya ;
- Bahwa satu bulan kemudian, terdakwa II JOHN LUCMAN menyuruh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi TEDDY GAUTAMA untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pesanan besi beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara JOSEPH LUCMAN dengan DAVID GAUTAMA. Saksi korban DAVID GAUTAMA yang semula tidak percaya dengan terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, kemudian menghubungi JOSEPH LUCMAN untuk menanyakan

mengapa yang datang adalah terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, lalu JOSEPH LUCMAN meyakinkan saksi korban DAVID GAUTAMA bahwa perusahaan terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dan PT. ASINDO INDAH GRYATAMA dan jika timbul masalah maka terdakwa II JOHN LUCMAN yang akan bertanggung jawab , karena proyek pembangunan Carrefour & hypermart panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga LUCMAN ;

- Bahwa atas perkataan JOSEPH LUCMAN maka saksi korban DAVID GAUTAMA menyanggupi untuk memasok besi beton dan wiremesh kepada perusahaan terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) dan saksi korban DAVID GAUTAMA menyetujui disusunnya kontrak perjanjian besi beton dan wiremesh dan melakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun perjanjian jual beli Nomor 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa II FRANS TUNGGONO dan saksi TEDDY GAUTAMA, yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal hal sebagai berikut :

1. Pembayaran DP 30 % dari total pembelian, kemudian DP 30 % tersebut dipotong 10 % dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7x 270 m2 type paris yang berada di golden park Panakkukang Mas ;

2. Bahwa DP 30% tersebut dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (dekapen belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan ;

3. Bahwa terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bulan setelah perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI ;

4. Bahwa terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Pebruari 2005 ;

- Bahwa setelah pengiriman besi dilakukan sesuai dengan pesanan dengan total harga Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :

1. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

2. Tanggal 20 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

3. Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

4. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

5. Tanggal 30 Juni 2005 'sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 6. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 7. Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 8. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 9. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek masing masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 10. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh-. PT. KARUNIA SUKSES SEJATI tersebut hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30% sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjian jual beli besi beton tersebut dan total pembelian sebesar Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp. 9.725.027.573,- (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
 - Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya, sehingga keluarga GAUTAMA selalu menanyakan pembayaran tersebut, maka selanjutnya terdakwa II JOHN LUCMAN melalui CHANDRA, SH menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui bahwa ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga terdakwa II JOHN LUCMAN menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh bidang tanah tersebut, namun karena JOSEPH LUCMAN maupun terdakwa II JOHN LUCMAN sengaja tidak memberitahukan kepada DAVID GAUTAMA bahwa tanah tersebut sedang dalam perkara, maka saksi korban DAVID GAUTAMA pun menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah No. 033/AIG/SPPT/IV/2005 oleh CANDRA, SH dan saksi TEDDY - GAUTAMA ;
 - Bahwa untuk dapat tetap menguasai atau memiliki besi beton dan wiremesh yang dipesan dari PT. RODAMAS BAJA INTI, terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan nilai masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Yaitu cek No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, cek No. XM 155533

tanggal 20 Mei 2005, cek No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005, akan tetapi ketika saksi korban hendak mencairkan cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA karena SALDO TIDAK CUKUP;

- Demikian pula, 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO yaitu BG No. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- BG No.502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- dan BG No. BB. 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,- dan BG No. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004, juga tidak dapat dicairkan, karena tidak ada dananya ;
- Bahwa dan pihak PT. RODAMAS BAJA INTI pernah dua kali mencoba mencairkan cek dan Bilyet giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan ;
- Bahwa pada bulan Mei 2007, CANDRA, SH dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata ditingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut, dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas apabila terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO atau terdakwa II JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI membentahukan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut dalam sengketa/bermasalah, maka tentu saksi korban DAVID GAUTAMA tidak akan menyetujui untuk menerima 7 (tujuh) bidang tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut;
- Bahwa karena terdakwa I Ir FRANS TUNGGONO dan terdakwa II JOHN LUCMAN telah menguasai atau memiliki besi beton dan wiremesh yang dikirim oleh PT.RODAMAS BAJA INTI namun tidak pernah melakukan pembayaran sejak jatuh tempo pembayaran DP, yakni tanggal 27 Pebruari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut akan tetapi terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO karena semua sesungguhnya terdakwa II JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya dan pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN agar menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena

urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN;

- Bahwa selanjutnya dan pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut turut yakni :

Bertempat dikolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGOLO tetapi saksi BENNY LUCMAN me"nyatakan agar saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair.

Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dari Singapura akan membeli saham saham mereka ;

Ketiga kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua)

saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN .meminta agar bersabar karena kredit yang diajukannya di Bank Ekonomi akan segera terealisasi;

Keempat kalinya saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama sama, dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari terdakwa II JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan saksi JOSEPH LUCMAN di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh, pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang hutang tersebut akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi. Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan oktober 2007 atau bulan November 2007 mengadakan pertemuan dengan terdakwa II JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut dimana pada pertemuan tersebut saksi BENNY LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (terdakwa II JOHN LUCMAN, terdakwa I Ir. FRANS TUNGGOLO, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN) adalah satu Grup/suara dan selanjutnya terdakwa II JOHN LUCMAN menambahkan bahwa besi beton yang digunakan

oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI yang dipakai untuk membangun Carrefour dan hypermart adalah juga sama me'rupakan milik terdakwa II JOHN LUCMAN. Namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan dan besi beton tersebut tidak pernah dikembalikan kepada PT. RODAMAS BAJA INTI ;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO dan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menguasai besi beton & wirwmesh milik PT. RODAMAS BAJA INTI dan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menyuruh terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang merupakan alat untuk menguasai barang milik saksi korban, perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahuinya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton dan wiremesh, dan perbuatan terdakwa II JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan satu cara para terdakwa untuk menguasai besi beton & wiremesh milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya tidaknya sebesar Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) ; **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada kasus Nomor. 337/Pid.B/2011/PN.Mks, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Untuk:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Frans Tunggono dan terdakwa John Lucman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta dalam tindak pidana penipuan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Frans Tunggono dan terdakwa John Lucman dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BG an. PT Baja Mas Mulia Development:

- a. No. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. No. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);
 - c. No. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);
 - d. No. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu empat rupiah)
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT. Baja Mas Mulia Development No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu mily.ard rupiah),dengan surat penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli NO.147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa : surat jalan, tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang; 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : C2-12.899.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Desember 1997;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy surat kepala kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 Nopember 2006. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Adapun Pertimbangan Hakim dalam Kasus Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman, maupun Penasehat Hukurnnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa surat-surat dan dibenarkan oleh terdakwa I - Terdakwa II masing-masing :

1. Bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
 - a. No. BB502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);
 - b. No. BB502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah);
 - c. No. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah);
 - d. No. BB502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp 510.812.004.-(lima ratus sepuluh juta, delapan ratus dua belas ribu, empat rupiah);
 - (satu) lembar foto copy, cek cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), d'engan surat keterangan penolakan dan BCA tanggal 11 Juli 2005; - 1 (satu) lembar foto copy, Cek Cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Developmant, No. XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dan BCA tanggal 20 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, cek cross BCA an. PT baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dan BCA tanggal 30 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, surat perjanjian pembelian tanah No. 003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, surat perjanjian jual beli nomor : 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004; 1 (satu) lembar foto copy, dokumen berupa surat jalan tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy, surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :C2-12.899.HT.01.04 Th 97 tanggal 10 Desember 1997;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy, surat Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2006;
2. Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa khususnya :
 - Foto copy Berita Acara Pernyataan Kesediaan Untuk Membayar No.01 Konsignasi 2011/PN.Mks. tanggal 07 Nopember 2011 ;
 - Foto copy Tanda Terima No.01 Konsignasi 2011/PN.Mks. dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa PT. Rodamas Baja Inti (Peter Kurniawan) ;

- Foto copy Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 07 Nopember 2011 dan Bilyet Giro No.AAI 425329 tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi, Ahli, dihubungkan dengan keterangan terdakwa I, terdakwa II dan surat surat yang diajukan dipersidangan yang dipandang berhubungan satu sama lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Bulan September 2004 PT. Asindo Gryatama bersama sama denga PT. Baja Mas Mulia Development (Terafiliasi) berkeinginan untuk mernbangun Panakukang Square, dimana lahan untuk pembangunan Panakkukang Square tersebut adalah milik PT. Asindo Griyatama sedangkan yang membangun adalah PT. Baja Mas Mulia Development dan perjanjian kerja sama ini dituangkan dalam BOT;
2. Bahwa PT. Baja Mas Mulia Development, dalam melaksanakan pembangunan Panakukang Square tersebut telah menunjuk 2 (dua) kontraktor besar yaitu PT. Morinda dan PT. Karunia Sejati dengan nilai kontrak sebesar Rp 37.00C.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar);
3. Bahwa Pada bulan September 2004, ada pembicaraan antara saksi David Gautama (PT. Roda Mas Baja Intif dengan Saksi Joseph Lucman yang awalnya membicarakan mengenai pelayanan Gereja dan kemudian saksi David Gautama menayakan mengenai pembangunan Panakkukan Square yang pada saat itu pembangunan proyek belum jalan dan oleh saksi Joseph Lucman mengatakan bahwa ia mendengar dari saksi Chandra bahwa ada rencana PT. Asindo Gryatama akan bekerja sama dengan PT. Baja Mas Mulia Development untuk membangun Panakkukang Square, yang rencananya sebagai kontraktor adalah PT. Morinda dan dilanjutkan dengan pembelian besi;
4. Bahwa menjelang satu bulan kemudian saksi Joseph Lucman ditelepon oleh saksi Teddy Gautama dan menanyakan kedatangan terdakwa I Frans lunggono (PT. Baja Mas Mulia Development) pada kantor PT. Roda Mas Baja Inti, dan oleh saksi Joseph Luncman mengatakan bahwa terdakwa I Frans Tunggono adalah Ipar dan terdakwa II John Lucman;
5. Bahwa dalam pembicaraan di kantor PT Roda Mas Baja Inti pada bulan September 2004 tersebut, terdakwa I Frans Tunggono membicarakan mengenai pembelian besi dalam jumlah yang banyak dan disetujui oleh saksi Jemmy Gautama karena. saksi Joseph Lucman mengatakan, terdakwa I sebagai Direktur PT. Karunia Sejati adalah membawa nama besar PT Asindo
6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan pada bulan September 2004 tersebut, antara terdakwa I Frans Tunggono dengan saksi Jemmy Gautama mengenai pembelian besi, maka dibuatlah kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli pada tanggal 1 Desember 2004;

7. Bahwa dalam surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 147/RMBI/2004 tertanggal 1 Desember 2004 untuk pembangunan Carefour, yang ditanda tangani oleh Pihak pertama : Terdakwa I, Frans Tunggono selaku Owner (pemilik) Perusahaan PT. Karunia Sejati dengan saksi Teddy Gautama selaku Direktur Manager PT. Roda Mas Baja Inti yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Ditentukan, total kontrak pembelian besi beton dan waremesh sesuai Pasal 1. Diangsur selama delapan kali sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1 A. 1 B. 1C.1D.1E.1F.1G.1H. dan 1 Pasal tambahan yaitu Pasal 1 yang disertai tanggal pengambilan jumlah quantity, harga perincian angsuran pembayaran 18 bulan dan cicilan pembarteran tanah sebesar 10 %. yang dipotong pada setiap angsuran DP (down payment) 30 %. pembarteran tanah 10 % dibayar sebanyak 8 kali tambah 1 kali tambahan total 9 kali / sesuai jumlah pembayaran DP;
8. Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian jual beli tersebut diatas, pihak kedua (PT. Roda Mas Baja Inti) bersedia mengadakan pembarteran tanah 10 % dari total pembelian (tidak termasuk PPN) dan akan dipotong pada setiap angsuran pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 1 a - 1 f sebagaimana tersebut diatas, sedang dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pihak pertama bersedia membayar Down Payment sebesar 30 % dan dibayar dengan Cek/BG mundur selama kurang lebih 90 hari (3 bulan) dan membayar angsuran dengan BG/Cek mundur sesuai dengan perincian; dan dalam Pasal 5, dinyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua berjanji tidak akan membatalkan kontrak ini. Apabila salah satu dan kedua belah pihak membatalkan kontrak tersebut , maka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 25 %;
9. Bahwa total nilai pembelian besi dan waremesh dari terdakwa I Frans Tunggono kepada PT Roda Mas Baja Inti' sesuai dengan perjanjian tersebut diatas, sejumlah Rp.32,400.000.000.- (tiga puluh dua milliard empat ratus juta rupiah) sedang sisa hutang yang belum dibayar adalah sebesar Rp.28.000.000.000.- (dua puluh delapan milyard), belum termasuk bunga dan total pembelian tersebut;
10. Bahwa dalam pengiriman besi yang dilaksanakan oleh pihak PT. Roda Mas 6aja Inti, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, dan pembayarannya pun dilakukan secara bertahap. Dan dari total pembelian besi tersebut ada besi yang tidak disuply oleh pihak PT. Roda Mas Baja Inti seharga lebih kurang Rp. 1.600.000.000.- (satu milyard enam ratus juta rupiah);
11. Bahwa ke 7 bidang tanah yang diperjanjikan tersebut, dalam surat perjanjian jual beli diperhitungkan sebagai pembayaran DP 10 %, dan kemudian sesuai dengan perjanjian nomor: 3 tanggal 29 april 2005, nilai tanah diperhitungkan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.835.000.000.- (dua milyard, delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli nomor 147/RMBI/2004 tertanggal 1 Desember 2004 sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Ir. Frans Tunggono selaku owner PT. Karunia Sejati sebagai pihak pertama, telah melakukan pembayaran kepada PT. Roda .Mas Baja Inti sebagai berikut :
- Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah);
 - Tanggal 20 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 - Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
 - Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar Cek masing masing senilai Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
- Jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh terdakwa I Ir. Frans Tunggono selaku owner PT Karunia Sejati, sebagai pihak pertama, kepada PT. Roda Mas Baja Inti sebagai pihak kedua adalah sebesar Rp 3.740.000.000.- (tiga milyar, tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
13. Bahwa PT Baja Mas Mulia Development pernah mengeluarkan 5 (lima) lembar Cek Cross dengan menggunakan satu nomor rekening yang artinya Cek Cross tersebut tidak dapat ditarik tunai. Dan yang menandatangani Cek tersebut adalah saksi Lanny Sau atas dasar surat kuasa dan Perintah dan Bapak Boy Sulaiman yang pada waktu itu sebagai Direktur Utama PT. Baja Mas Mulia Development;
14. Bahwa dan 5 (lima) lembar Cek Cross yang dikeluarkan tersebut 2 (dua) diantaranya telah dicairkan, sedang 3 (tiga) lembar Cek Cross masing : 1. Cek Cross Nomor: XM 155532 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar) tertanggal 10 Mei 2005, 2. Cek Cross Nomor: XM 155533, senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar) tertanggal 20 Mei 2005, 3. Cek Cross Nomor: 155534 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar) tertanggal 30 Mei 2005, menurut saksi Lanny Sau, belum pernah dicairkan dan tidak ada pemberitahuan dan pihak Bank BCA kalau ketiga Cek Cross yang ditandatanganinya adalah kosong;

15. Bahwa sedang menurut keterangan saksi. masing - masing, saksi Jemmy Gautama, saksi Teddy Gautama, saksi David Gautama ketiga Cek Cross tersebut, diatas pernah dicairkan akan tetapi ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldonya tidak mencukupi;
16. Bahwa menurut saksi Elfriawati Tumewah (Pegawai pada Bank BCA), bahwa ketiga Cek Cross tersebut, pernah dikeluarkan penolakan warkat la I u lintas pembayaran Giral dengan alasan saldo tidak cukup, dan surat penolakan tersebut dikeluarkan atas permintaan dari pihak PT Roda Mas Baja Inti pada saat itu juga yaitu: masing tanggal 30 Mei 2005, tanggal 20 Juni 2005, tanggal 11 Juli 2005. dan apabila surat penolakan tersebut tidak diminta oleh pihak PT. Roda Mas Baja Inti, maka tidak akan diberikan oleh saksi;
17. Bahwa dilain pihak saksi Elfriawati Tumewah (pegawai Bank BCA), membenarkan surat tertanggal 24 Pebruari 2010, yang ditandatanganinya dan menerangkan bahwa, berdasarkan registrasi warkat, maka warkat tersebut dibawah ini belum pernah ditank/ditransfer/diuangkan : 1. Cek No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), 2. Cek No. XM 155533 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar), 3. Cek No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar), demikian juga dengan surat tertanggal 09 Mart 2010 yang menerangkan bahwa Rekening giro ac.no.390.3800905 atas nama PT. Baja Mas Mulia Development sejak rekening dibuka tanggal 11 Januari 2005, sampai diterbitkan surat ini tidak pernah tercatat dan tercantum dalam daftar hitam Nasional (DHN);
18. Bahwa ketiga Cek Cross tersebut masing : 1. Cek Nomor : 155532 tanggal 10 Mei 2005 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), 2. Cek Nomor : 155533 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), 3. Cek Nomor : 155534 tanggal 30 Mei 2005 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut diatas, tidak pernah diperlihatkan aslmya didalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperlihatkan aslinya;
19. Bahwa tanah 7 (tujuh) kapling tanah milik PT. Asindo, yang dijadikan sebagai pembayaran DP untuk pembelian besi oleh PT Karunia Sejati pada PT Roda Mas, oleh karena terdakwa II John Lucman adalah sebagai pemilik saham pada PT. Asindo dan PT. Baja Mas Mulia Inti. Dan 7 (tujuh) kapling tanah tersebut, telah dituangkan dalam surat perjanjian pembelian tanah No. 003/AIG/SPPT/IV/2005 tertanggal 29 April 2005 yang ditanda tangani oleh saksi Chandra, SH selaku Dirut PT. Asindo dan Teddy Gautama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Roda Mas;
20. Bahwa dalam surat perjanjian pembelian tanah tersebut dalam Pasal 6, ditentukan bahwa, jika perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian mi. maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan

perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi jika cara ini tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar;

21. Bahwa ketujuh kapling tanah tersebut, pada saat dibuat surat perjanjian pembelian tanah sedang dalam proses perkara dan pada tingkat banding dalam posisi menarlg akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
22. Bahwa PT. Roda Mas Baja Inti, pernah beberapa kali melakukan penagihan kepada terdakwa I Frans Tunggono akan tetapi terdakwa I hanya memberikan janji , yaitu pertama akan membayar hutangnya, kedua akan membayar sambil menunggu Investor dari Singapura yang akan membeli saham-saham PT. Asindo dan yang keriga terdakwa I Frans Tunggono melimpahkan tanggung jawabnya kepada terdakwa II Jhon Lucman, yang katanya menunggu dana dari BRI yang akan cair;
23. Bahwa setelah terjadi kemacetan pembayaran, terdakwa I Frans Tunggono pernah menanyakan kepada terdakwa II John Lucman mengapa tidak ada pembayaran lagi, dan dijawab oleh terdakwa II, bahwa sekarang lagi terpuruk dan tolong difasilitasi untuk membayar dengan menggunakan asset yaitu PMCC dan gedung Ramayana, dan setelah ditawarkan permintaan terdakwa II kepada pihak PT. Roda Mas Baja Inti, permintaan tersebut ditolak, dan terdakwa I juga pernah mendengar terdakwa II menefepon Saksi Teddy Gautama yang mengatakan bahwa lagi kesulitan uan'g dan akan dibayar dengan menggunakan asset gedung Ramayana akan tetapi pihak Roda Mas Baja Inti tidak man, dan maunya dengan uang tunai;
24. Bahwa PT Roda Mas Baja Inti sudah pernah berupaya menyelesaikan masalah mi dengan keluarga mereka akan tetapi tidak berhasil, dan juga pernah ketemu dengan terdakwa II John Lucman, akan tetapi hanya diberikan janji, berupa kalau Aset mereka sudah terjual akan dibayar dan PT. Roda Mas pada waktu ditawarkan dibayar dengan Aset tidak mau menerima;
25. Bahwa keluarga terdakwa II telah berkaii kali untuk berupaya untuk menyelesaikan hutang tersebut, dimana kakak terdakwa II yaitu saksi Benny Lucman pada tahun 2006 berte'mpat di Mall Artha Gading didatangi oleh David Gautama dan memperkenalkan kakaknya Sucipto Gautama dan pada saat makan di restoran Tan Wan ada 3 (tiga) hal yang dikemukakan oleh saksi David Gautama, yaitu pertama pengambilan besi dan PT. Karunia Sejati untuk proyek Panakukan Square dan terjadi kemacetan pembayaran pada waktu itu sebesar Rp. 29.000.000.000.-(dua puluh Sembilan milyar) dan kedua ada 3 (tiga) lembar cek Cross yang sudah dak.arsa yang masing masing bernilai Rp 1.000.000.000.- (satu milliard) namun ketiga cek cross tersebut tidak ditunjukkan, dan kemudian ada tanah yang diserahkan 7 kapiling ternyata bermasalah;

26. Bahwa karena terdakwa II John Lucman be'rmasalah, maka saksi Benny Lucman setelah mendapat informasi bahwa benar ada kesulitan pembayaran maka sebagai kakak dan sebagai keluarga dan atas dasar tanggung jawab moral saksi Benny Lucman bersedia membantu untuk mencari investor dan berusaha meminjamkan uang sebesar Rp 26.000.000.000. (dua puluh enam milyar) kepada PT. Baja Mas Development, donasi kewajiban PT Karunia Sejati kepada PT Roda Mas Baja Inti dan disetujui;
27. Bahwa setelah ada 4 Investor yang berminat, tiba-tiba ada satu investor yang menanyakan tentang adanya surat dari PT. Roda Mas Baja Inti yang mengatakan bahwa keluarga Lucman mulai dari kakek, mama, kakak dan saksi Benny Lucman adalah munafik dan penipu, dan ini beredar sampai ke luar negeri, dan setelah adanya surat tersebut, saksi Benny Lucman yakinkan kembali kepada Investor dan mereka masih tertarik untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000.000.- (empat ratus milyar) sesuai dengan bukti pada saksi Benny Lucman;
28. Bahwa kemudian saksi Benny Lucman besama-sama dengan Pak Charles mengajak saksi David Gautama bersama istrinya, dan Sucipto Gautama, Jhon Gautama ke Bapindo Plaza Jalan Sudirman untuk berdialog, karena sudah siap untuk membayar Rp 26.000.000.000.- (dua puluh enam milyar), dan kemudian dilanjutkan pertemuan di Hotel Sheraton, namun pihak PT. Roda Mas Baja Inti telah berubah dan mengajukan angka sebesar Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar), dan pada pertemuan lanjutan melalui kuasa pihak PT. Roda Mas Baja Inti yaitu Pak Lucas, SH menaikkan lagi cicilan menjadi Rp 60.000.000.000.- (enam puluh milyar);
29. Bahwa Hutang terhadap pihak PT. Roda Mas Baja Inti pada saat itu, tidak bisa dibayar, oleh karena angkanya selalu berubah ubah sehingga tidak adanya suatu kepastian yang pasti;
30. Bahwa pada hari SENIN tanggal 07 NOVEMBER 2011 telah dibuat Berita Acara Pernyataan Kesiediaan Untuk membayar No. 01 Konsingnasi 2011/PN.Makassar, dimana pihak PT. Roda Mas Baja Inti, bersedia menerima pembayaran penawaran pembayaran utang sebesar Rp 28.013.480.248.- (dua puluh delapan milyar, tigabelas juta, empat ratus delapan puluh nbu, dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan telah dibuat tanda terima nomor.01 Konsignasi 2011/PN.Mks. dimana yang menyerahkan adalah Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, sedang yang menerima dari pihak PT. Roda Mas Baja Inti adalah adalah Peter Kurniawan, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dapat dipersalahkan melakukan suatu perbuatan Pidana, Majelis Hakim memandang perlu untuk

mempertimbangkan pengertian Penipuan, Tipu muslihat dan Rangkaian kata kata bohong dengan tidak melaksanakan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa Penipuan atau Tipu Muslihat, berdasarkan arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil - dalil palsu dan gambaran-gambaran yang keiru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedang kebohongan yang berasal dari kata dasar "bohong" dimana menurut kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka Jakarta tahun 1976, "Bohong" adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, dengan demikian kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada atau sudah ada pada saat pernyataan itu diucapkan, sedang menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan terhadap Harta Benda berpendapat bahwa "Ketidakbenaran yang terdapat pada Tipu Muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan Tipu Muslihat", sehingga menurut pendapat tersebut bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan, sudah harus membuktikan ketidak benarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa sedang kata janji adalah suatu perkataan/pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk berbuat sesuatu yang digantungkan pada suatu waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang telah ditentukan tersebut dilampaui/tidak ditepati, maka hal tersebut disebut ingkar janji. Demikian kata lain ingkar janji, lahir atau timbul setelah pernyataan itu diungkapkan atau diucapkan;

Menimbang, bahwa dan hal tersebut diatas dapatlah dibedakan antara Tipu Muslihat dan berbohong dalam unsur tindak pidana Penipuan dengan Ingkar Janji dalam hubungan kontraktual yaitu : Tipu Muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidak benarannya sebelum perbuatan/pernyataan itu dibuat atau sebelum perjanjian itu ditutup, sedang ingkar janji harus dibuktikan ketidak benarannya pada suatu waktu tertentu setelah perjanjian itu dibuat atau setelah itu perjanjian ditutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta - fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu KESATU : melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa I Ir. Frans Tunggono selaku Direktur Utama PT Karunia Sejati sebagai pihak pertama telah membuat dan menandatangani surat perjanjian jual beli Nomor 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004 dengan saksi Teddy Gautama selaku Direktur Manager PT. Roda Mas

Baja Inti sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut ditentukan antara lain, Total kontrak pembelian besi beton dan waremesh sesuai Pasal 1 diangsur 8 kali, pihak kedua bersedia mengadakan perbarteran tanah sebesar 10 % dari total pembelian (tidak termasuk PPn) dan akan dipotong pada setiap angsuran pembavaran, pihak pertama bersedia membayar Down Payment sebesar 30 % dari iumlah pembelian yang disepakati tanggal pembeliannya dan dibayar dengan Cek/BG mundur selama + 90 hari (3 bulan), pihak pertama dan pihak kedua berjanji tidak akan membatalkan kontrak ini, dan apabila salah satu membatalkan kontrak diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 25 %, pihak pertama harus mengambil/menyelesaikan seluruh pembayaran selambat lambatnya 10 hari dan berakhirnya kontrak ini;

Menimbang, bahwa sebelum perjanjian jual beli tersebut, dibuat dan ditandatangani. terlebih dahulu pada bulan September 2004 ada pembicaraan antara saksi Joseph Lucman dengan David Gautama, mengenai rencana PT. Asindo Gryatama dengan PT. Baja Mas Mulia Developmen akan membangun Panakkang Square, dan satu bulan kemudian saksi Joseph Lucman ditelepon oleh saksi Teddy Gautama yang menanyakan kedatangan terdakwa I Ir Frans Tunggono pada kantor PT. Roda Mas Baja Inti. Oleh saksi Joseph Lucman mengatakan bahwa terdakwa I Ir Frans Tunggono adalah ipar dari terdakwa II Jhon Lucman;

Menimbang, bahwa mencermati perjanjian yang dibuat tersebut diatas, dimana sebelum dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa I Ir.Frans Tunggono dengan saksi Teddy Gautama, terlebih dahulu ada pembicaraan antara saksi David Gautama dengan saksi Joseph Lucman yang kemudian dilanjutkan pembicaraan antara saksi Teddv Gautama dengan saksi Joseph Lucman mengenai pembangunan Panakukang Squire dan pembelian besi. pembicaraan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian Jual beli Nomor 147/RMBI/2004 tertanggal 1 Desember 2004;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, proses perjanjian yang demikian itu haruslah dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1370 KUHPerdara yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. dan oleh karena perjanjian tersebut adalah sah, maka akan menimbulkan bebe'apa hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini terdakwa I Ir. Frans Tunggono sebagai pihak pertama dan saksi Teddy Gautama sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, PT. Roda Mas Raja Inti selaku pihak kedua, telah melakukan pengiriman besi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, dan dari total pembelian besi tersebut, ada besi yang tid'ak dikirim oleh pihak PT. Roda Mas Baja Inti seharga lebih kurang Rp 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah), sedang terdakwa I Ir. Frans Tunggono selaku Direktur Utama PT. Karunia Sejati telah melaksanakan sebahagian kewajibannya dengan

melakukan pembayaran kepada PT. Roda Mas Baja Inti masing masing sebagai berikut:

- Tanggal 10 April 2005, sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 20 April 2005, sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2005, sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2005, sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2005, sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Juli 2005, sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 20 Juli 2005, sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 30 Juli 2005, sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2005, dengan menggunakan 5 (lima) lembar Cek, masing masing senilai Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar, dua ratus lima puluh juta rupiah); tanggal 31 Oktober 2005, sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh terdakwa I Ir. Frans Tunggono selaku Direktur Utama PT. Karunia Sejati sebagai pihak pertama kepada PT Roda Mas Baja Inti sebagai pihak kedua sebesar Rp 3.740.000.000.- (tiga milyar, tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain terdakwa I Ir. Frans Tunggono, telah melakukan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, juga telah melakukan pembayaran dengan menggunakan 3 (tiga) lembar Cek Cross yang diberikan oleh saksi Lanny Sau, masing masing 1. Cek Cross nomor: XM 155532 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), 2. Cek Cross nomor : XM 155533 senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), 3. Cek Cross nomor : 155534 (satu milyar rupiah) dimana ketiga Cek Cross tersebut ditandatangani oleh saksi Lanny Sau, atas perintah dan kuasa dari Boy Sulaiman yang pada waktu itu sebagai Direktur Utama PT. Baja Mas Development . dan pada saat ketiga Cek Cross tersebut dicairkan dananya tidak mencukupi. dan menurut saksi Elfriati Tumeweh, pegawai pada Bank BCA, pernah menandatangani penolakan warkat la I u lintas pembayaran, masing-masing tertanggal 30 Mei 2005., tanggal 20 Juni 2006 dan tanggal 10 Juli 2005 dengan alasan saldo tidak mencukupi. penolakan tersebut atas permintaan dari pihak PT. Roda Mas Baja Inti pada saat yang sama. Di lain pihak saksi, Elfriawati Tumeweh tersebut, membenarkan surat tertanggal 24 Februari 2010 yang ditandatanganinya yang menerangkan- bahwa berdasarkan registrasi warkat ketiga Cek Cross tersebut belum pernah ditarik/ditransfer/diuangkan dan juga

menerangkan bahwa rekening PT Baja Mas Mulia Development sejak dibuka tanggal 11 Januari 2005, sampai diterbitkan surat ini belum tercantum dalam dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Dan ketiga Cek Cross tersebut, tidak pernah dipe- ' lihatkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjanjian nomor 147/RMBI/2002 taigggak 1 Desember 2004 tersebut ditentukan, bahwa pihak kedua bersedia mengadakan pembarteran tanah sebesar 10 % dari total pembelian (tidak termasuk PPn) dan akan dipotong pada setiap angsuran pembayaran, yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tertanggal 29 April 2005 yang ditanda tangani oleh saksi Chandra, SH sebagai Direktur Utama PT. Asindo Indah Gryatama sebagai pihak pertama dengan Teddy Gautama, bertindak untuk dan atas nama PT. Roda Mas sebagai pihak kedua, dimana ditentukan, bahwa jika terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi jika cara ini tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebelum perjanjian dibuat dan disepakati antara terdakwa I Frans Tunggono sebagai Direktur Utama PT Karunia Sejati dengan saksi Teddy Gautama selaku Direktur Manager PT Roda Mas Baja Inti yang dituangkan da la ni urat perjanjian Jual beli nomor : 147/RMBI/2004 tertanggal 1 Desemwar 2004 , didalam persidangan tidak diketemukan adanya rangkaian kata-kata bohong, nama palsu atau keadaan palsu, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. dan menurut pendapat, J. Satrio ada tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian haruslah dilihat pada proses kesepakatan itu dibuat, dan bukan pada saat terjadinya wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan isi perjanjian tanggal 1 Desember 2004, tersebut terdakwa I Ir. Frans Tunggono, telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total sebesar Rp 3.740.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan melakukan pembayaran dengan 3 (tiga) lembar Cek Cross sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketiga Cek Cross tersebut yang dalam persidangan tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi hanya berupa foto copy, yang dalam dakvvaan Jaksa Penuntut urnum, mengatakan bahwa pada saat ketiga Cek Cross tersebut dicairkan oleh saksi David Gautama, ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo tidak mencukupi, sebagaimana surat keterangan penolakkan warkat lalu lintas pembayaran Giral masing-masing tanggal 30 Mei 2005 No. sen : XM 155534, tanggal 20 Juni 2005 No. seri: XM 155533, tanggal 11 Juli 2005 No. seri : XM 155532, yang ditanda tangani oleh saksi Elvinawati

Tumewah dan Sarlotha Pasolang, namun dilain pihak, berdasarkan surat tertanggal 24 Pebruari 2010 PT. Bank Central Asia cabang Makasar yang ditandatangani oleh saksi Elvriawati Tumewah dan Nurmi menerangkan bahwa ketiga Cek Cross tersebut belum pernah ditarik/ditransfer/diuangkan dan kemudian berdasarkan surat tertanggal 04 Marel 2010 piha BCA , menerangkan bahwa berdasarkan catatan pihak BCA ketiga Cek Cross tersebut, hingga saat ini beluro pernah dicairkan di BCA dan sehubungan dengan penarikan tersebut, pihak BCA tidak menerbitkan surat permngatan terhadap Rekening Giro ac. 3903800905 atas nama PT. Baja Mas Mulia Development dan berstatus aktif hingga saat ini, dan kemudian dengan surat tertanggal 09 Marel 2010, menerangkan bahwa rekening giro tersebut sejak dibuka 11 Januari 2005, sampai diterbitkannya surat ini tidak pernah tercatat dan tercantum dalam daftar hitam nasional (DHN);

Menimbang, bahwa terhadap ke tiga Cek Cross tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama ke tiga Cek Cross tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga keterangan saksi Elvriawati Tumewah dan pihak Bank BCA yang mengeluarkan surat keterangan penolakan warka lalu lintas pembayaran giral, berubah - ubah, sehingga apabila benar ke tiga Cek Cross tersebut pernah dicairkan secara berturut turut tiga kali dan telah dilakukan penolakkan oleh pihak Bank BCA, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 8 Juni 2000, rekening dimaksud otomatis akan ditutup dan akan dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHi\J), namun hal ini tidak ditemukan dalam persidangan, sehingga pencairan ke tiga Cek Cross tersebut patut diragukan kebenarannya, apakah pernah di ;;airkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah ke tiga Cek Cross tersebut pernah dicairkan atau tidak. dalam dunia usaha, manakala pembayaran yang dilakukan dengar menggunakan Cek dan ternyata apabila cek tersebut dicairkan, ternyata tidak tersedianya dana yang cukup, maka hal yang demikian adalah I ;;im tenadi , dan apabila hal tersebut terjadi tidak secara serta merta penank telah melakukan penipuan, sebab dalam dunia usaha pengeluaran cek adalah merupakan bagian dari control masuk keluarnya keuangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjanjian jua! beli besi tertangga! 1 Desember 2004 didalam Pasal 3 ditentukan bahwa pihak kedua (PT. Roda Mas Baja Inti) bersedia mengadakan pembarteran tanah sebesar 10 % dan total pembelian (tidak termasuk PPN) dan akan dipotong pada setiap angsuran pembayaran seperti tercantum pada Pasal la - f, yang selanjutnya ditindakia njudi dengan surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tertanggal 29 April 2005 yang ditanda tangani oleh saksi Chandra, SH sebagai Direktur Utama PT. Asindo dengan Teddy Gautama yang bertindak untul- dan atas nama PT. Roda Mas Baja Inti;

Menimbang bahwa dalam perjanjian tanggal 29 April 2005 tersebut, dalam Pasal 2 ditentukan, pihak kedua (PT. Roda Mas) setujuh, bahwa

harga dan cara pembayaran dan kavling yang dibeli seperti tercantum dalam Pasal 1 adalah sesuai dengan lampiran 1, dan dalam Pasal 6 ditentukan, jika terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat. Akan tetapi jika cara ini tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa mencermati isi perjanjian dimaksud, ke 7 bidang tanah tersebut, adalah merupakan bagian dari pembayaran yang diperhitungkan sebagai cicilan dalam perjanjian jual beli besi, sehingga apabila dikemudian akan terjadi perselisihan kedua belah pihak telah memilih Pengadilan Negeri Makassar untuk berwenang mengadili perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kemacetan pembayaran terdakwa I Ir. Frans Tunggono, menanyakan kepada terdakwa II Jhon Lucman, mengenai kemacetan tersebut dan oleh terdakwa II mengatakan sekarang lagi terpuruk, dan minta tolong untuk difasilitasi membayar dengan menggunakan asset yaitu berupa PMCC dan gedung Ramayana. dan setelah ditawarkan kepada pihak PT. Roda Mas Baja Inti, mereka menolak dan terdakwa II juga pernah menawarkan melalui telepon mengenai hal tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kakak dan terdakwa II John Lucman yaitu saksi Benny lucman telah berka ! kali mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Roda Mas Baja Inti untuk menyelesaikan hutang tersebut, dimana awalnya sudah siap untuk membayar sebesar Rp 26.000.000.000.- (dua puluh enam milyar rupiah), dan setelah diadakan pertemuan berikutnya pihak PT. Roda Mas Baja Inti mengajukan angka sebesar Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah), dan kemudian pada pertemuan lanjutan melalui kuasa PT. Roda Mas Baja Inti yaitu Luca SH mc naikan lagi menjadi Rp 60.000.000.000.- (enam puluh milyar rupiah). dan karena permintaan dari pihak PT. Roda Mas Baja Inti berubah ubah, maka upaya untuk melakukan pembayaran dari pihak keluarga terdakwa II Jhon Lucman pada saat itu menjadi tidak berhasil, sehingga terdakwa II Jhon Lucman komisar PT Baja Mas Mulia Development, u-u.it• mengajukan permohonan konsignasi sisa hutang yang belum dibayarkan, (sisa telah dibuat berita acara kesediaan untuk membayar No. 01 Konsignasi 2011/PN.Mks tertanggal 07 November 2011 dan pihak PT Roda Mas bersedia menerima pembayaran utang sebesar Rp. 28.013.480.248.- (dua puluh delapan milyar, tiga belas juta, empat ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan telah dibuat tanda terima pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya sisa hutang dan telah diterima baik oleh pihak PL. Roda Mas Baja Inti sebagaimana Berita Acara No.01 Konsignasi 2011/PN.Mks tertanggal 07 November 2011 tersebut diatas, maka perikatan yang timbul akibat perjanjian tertanggal 1 Desember 2004 menurut Pasal 1381 KUH perdata menjadi hapus ;

Menimbang, bahwa dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman yang pada waktu itu tidak melaksanakan isi perjanjian sebagai mana mestinya (wanprestasi), dan dilain pihak PT. Roda Mas Baja Inti juga tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh yaitu ada sisa besi yang tidak dikirtn senilcii IT • 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah), maka perbuatan terdakwa I nan terdakwa II tersebut, bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam lapangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I Ir. Frans Fun! gone dan terdakwa II Jhon Lucman, bukan merupakan perbuatan pida 1a, maka stsuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa I Ir. Frans tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon lucman dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan dan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam perkara mi, khususnya Pasal 191 ayat (2), Pasal 199 ayat (1) chin (2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Amar Putusan

Adapun Amar Putusan dalam Kasus Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman sebagaimana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana;
2. Melepaskan terdakwa i Ir. Frans Tunggono dan terdakwa II Jhon Lucman, olch katena itu, dan segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan, hak terdakwa I dan terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- L (satu) lembar foto copy BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
 - b. No. BB502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);
 - c. No. BB502093 tanggal 31 Ma ret 2006 sebesar Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah);
 - d. No. BB '02094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah);
 - e. No. BB502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp 510.812.004.- (lima ratus sepuluh juta, delapan ratus dua belas ribu, empat rupiah); 1 (satu) lembar foto copy, cek cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Developme No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan can BCA tanggal 11 Juli 2005;
 - I (satu) lembar foto copy, Cek Cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Oovelopnm, No. XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan mmolakan can BCA tanggal 20 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, cek cross BCA an. PT baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp i.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dan BCA tanggal 30 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, surat perjanjian pembelian tanah No. 003/AIG/SF PT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, surat perjanjian jual beli nomor : 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004;
 - 1 (satu) lembar foto copy, dokumen berupa surat jalan tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy, surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :C2 12.899.HT.01.04 Th 97 tanggal 10 Desember 1997;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy, surat Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2006; Tetap teriampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

6. Analisis Penulis

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mangacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nathan Lambe, S.H, M.H pada tanggal 4 Januari 2015, beliau berpendapat bahwa:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum keprdataan bukan merupakan hubungan hukum kepidanaan. Namun, perlu pula dilakukan pertimbangan hukum lainnya seperti halnya rangkaian kata-kata bohong dalam Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh para terdakwa. Jadi, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana.

Setelah penulis menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks, maka Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terlalu terburu-buru dalam menerapkan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan unsur-unsur Pasal 372 KUHP.

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur objektif

1. Barangsiapa

2. Menggerakkan orang lain agar:

- Menyerahkan suatu benda
- Mengadakan suatu perikatan utang
- Meniadakan suatu piutang

3. Dengan memakai:

- Sebuah nama palsu
- Suatu sifat palsu
- Tipu muslihat
- Rangkaian kata-kata bohong

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjektif : dengan sengaja

b. Unsur objektif :

1. Barangsiapa
2. Menguasai secara melawan hukum
3. Suatu benda
4. Sebagian dan seluruhnya kepunyaan orang lain
5. Berada padanya bukan karena kejahatan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu:

1. Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi yang sebenarnya diketahui bahwa tanah-tanah tersebut dalam sengketa. Terdakwa tidak memberitahukan status tanah tersebut kepada David Gautama bahwa tanah tersebut dalam sengketa.
2. Terdakwa juga melakukan kebohongan lagi dengan menyerahkan 3 (lembat) cek tetapi tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup.
3. Terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan dengan menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro tetapi tidak dapat dicairkan karena tidak adanya.
4. Rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. RODAMAS BAJA INTI, sebesar Rp.29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah).

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula keliru menafsirkan perjanjian jual beli No. : 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004 sebagai dasar alasan membenarkan atas tindakan para Terdakwa dalam melaksanakan perjanjian tersebut berupa pembayaran dengan menggunakan cek yang ternyata tidak ada dananya dan pembarteran atas 7 '(tujuh) bidang tanah yang ternyata bersengketa adalah sebagai Konsekuensi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Oleh karena hal tersebut tidak berdasar hukum karena dalam menilai suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana Penipuan, Majelis Hakim tidak perlu berpatokan pada sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana Arrest Hogeraad dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981 halaman 200, W 10227 antara lain mengatakan bahwa : *“ne: doet niet ter zake, of de aangevane schuld een geoorloofde oorzaak heeft. Voor de toepassing van 5r.326 doet de geldigheid der schuld naar burgerlijk recht met ter zake”* yang artinya : Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mencampur adukkan ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana serta keliru menerapkan

hukum tanpa mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum begitupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

B. Perbandingan Putusan Lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan Vonis yang Dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung

Adapun Pertimbangan Hakim yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan Kasasi Nomor. 871 K/Pid/2012 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, pada tanggal 24 November 2011, dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 20 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak

pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.1 Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan

Peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu.

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai kemudian mempertimbangkan keterangan Saksi Joseph Lucman, hal tersebut sebagaimana termuat dalam fakta hukum dalam putusan a quo halaman 56 pada point 3 disebutkan “bahwa pada bulan September 2004, ada pembicaraan antara saksi David Gautama (PT. Roda Mas Baja Inti) dengan saksi Joseph Lucman yang awalnya membicarakan mengenai pelayanan gereja dan kemudian saksi David Gautama menanyakan mengenai pembangunan Panakkukang Square yang pada saat itu pembangunan proyek belum jalan dan oleh saksi Joseph Lucman mengatakan bahwa ia mendengar dan saksi-Chandra bahwa ada rencana PT. Asmdo Indah Gnyatama akan bekerja sama dengan PT. Baia Mas Mulia Development untuk membangun Panakkukang Square, yang rencananya sebagai Kontraktor adalah PT. Murinda dan dilanjutkan dengan pembelian besi...”

Bahwa Majelis Hakim di dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut kemudian menjadikannya pertimbangan hukum tidaklah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menegaskan “Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas adalah semata-mata berasal dan keterangan saksi Joseph Lucman yang dan fakta hukum tersebut jelas seolah-olah memposisikan saksi David Gautama (Korban) dalam hal ini mewakili PT. Roda Mas Baja Inti yang justru sedari awal menawarkan din untuk dapat menyuplai besi pada pembangunan carefour tersebut hal mana sangat bertentangan dengan keterangan saksi David Gautama, saksi Teddy Gautama, dan saksi Jemmy Gautama serta keterangan Terdakwa Ir. Frans Tunggono;

Bahwa dengan diterimanya keterangan saksi Joseph Lucman tersebut dan kemudian dipertimbangkan dalam Fakta hukum jelas Majelis Hakim telah mengalami kekeliruan dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan huruf c KUHAP; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu mendasarkan putusannya sebagaimana termuat dalam fakta hukum hal, 56 tersebut di atas, berdasarkan keterangan satu orang saksi saja;

2. Bahwa Judex Facti tidak pula menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam mencatat dan mempertimbangkan keterangan saksi Elvriawaty Tumewah dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengabaikan keterangan saksi Elvriawaty Tumewah yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa penarikan cek dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui countre atau melalui kliring dan pencairan dengan cara pemindah bukuan atau melalui counter manakala cek tersebut dan rekening yang hendak dituju adalah berada pada bank yang sama sedangkan kliring dilakukan manakala bank penarik dan tertarik berbeda dan pada cek tersebut yang dilakukan adalah ofer the countre atau pemindah bukuan sehingga rekening PT. Baja Mas Mulia Development tetap aktif dan tidak termasuk dalam daftar hitam”. Bahwa keterangan saksi Elvriawaty Tumewah sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak tercatat sebagai keterangan saksi dalam putusan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengabaikan atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 202 ayat (2) KUHAP yaitu “Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, Terdakwa dan ahli kecualijika hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya”.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut di atas membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengalami kekeliruan oleh karena dilihat dari fungsinya berita acara tersebut merupakan sumber landasan data dan fakta dalam mengambil keputusan dimana pertimbangan putusan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan data dan fakta yang terdapat dalam berita acara sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim menyangkut tidak tercantumnya rekening PT. Baja Mas Mulia Development dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) tidaklah dapat disimpulkan secara serta merta oleh Majelis Hakim bahwa terhadap ketiga cek tersebut diragukan kebenarannya apakah telah dicairkan atau tidak? karena secara nyata Saksi Elvriawaty Tumewah dalam keterangannya pun telah menegaskan hal tersebut:

Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah salah pula menerapkan hukum dalam memaknai Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dijadikan dasar untuk tidak menyatakan Terdakwa bersalah atau meragukan kebenaran apakah cek tersebut pernah dicairkan atau tidak sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan, karena DHN hanyalah catatan dan Bank Indonesia (BI) terhadap seseorang yang telah menerbitkan cek kosong, namun bukan berarti catatan DHN lah yang menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, karena apabila seseorang menerbitkan suatu cek (alat pembayaran yang bersifat tunai) dan diketahuinya tidak tersedianya dana dalam rekening yang dipakai dalam penerbitan cek tersebut, maka Tindak Pidana Penipuan telah terjadi.

Dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “apabila pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek ternyata apabila cek tersebut dicairkan ternyata tidak tersedianya dana yang cukup maka hal yang demikian adalah lazim terjadi dan apabila hal tersebut terjadi tidak secara serta merta penarik telah melakukan penipuan”. Pertimbangan ini tidak ada dasar hukumnya dan Majelis Hakim tidak menunjukkan ketentuan/aturan hukum yang mendasari pertimbangannya tersebut. Sebaliknya, dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa “cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan.” Pasal 190 a KUHP menyatakan bahwa “kewajiban penerbit menyediakan dana itu selambat-lambatnya pada saat bayar surat cek, artinya pada saat surat cek itu diperlihatkan...”

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Abdul kadir Muhammad, SH.. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga”, pada halaman 177 dikatakan: “Surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenai lembaga akseptasi, setiap waktu diperlihatkan kepada banker, ia harus dibayar.”

Bahwa selain hal tersebut di atas terdapat pula beberapa keterangan SAKSI maupun AHLI terkait penerbitan cek dan BG kosong, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, yaitu:

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan SAKSI ELFRIAWATI TUMEWAH di muka persidangan yang menyatakan “Bahwa, terhadap ketiga Cek Cross tersebut, sebelum dibuat surat keterangan penolakan warkat lalu lintas oleh saksi, terlebih dahulu saksi melakukan pengecekan di rekening PT. Baja Mas Mulia Development dan ternyata dana tidak mencukupi” (vide halaman 30 Putusan).

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan AHLI HANUNG HADISURIPTO, SH., MH., yang menyatakan “kewajiban penarik cek dalam hal ini PT. Baja Mas Mulia Development wajib menyediakan dana yang cukup saat cek diunjukkan” (vide halaman 44 Putusan).

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH., MH., yang menyatakan “ketika si penarik cek, bilyet giro bermaksud mengkliring, mencairkan/menukar dengan nifai uang, namun ternyata tidak bisa dilakukan dengan alasan dananya tidak mencukupi. dananya kosong, rekeningnya telah ditutup, adalah tindak pidana penipuan yang secara nyata merugikan pihak penerima cek, bilyet giro tersebut” (vide halaman 45 Putusan);

- Bahwa hal tersebut di atas telah pula sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.133/Kr/1973, tanggal 15-11-1975 yang memutuskan bahwa : “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam memaknai keterangan saksi Elvriawaty Tumewah dan dalam memaknai uraian perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penerbitan cek tersebut:

3. Bahwa selain hal tersebut di atas Judex Facti tidak pula menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Segala putusan

Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, hal tersebut sebagaimana terurai dalam Putusan a quo dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara dengan tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana telah pula diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang mengatur bahwa, “Surat putusan bukan pembedaan memuat” antara lain “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP diuraikan bahwa, “Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum,” saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum Terdakwa dan saksi korban”.

Bahwa setelah mencermati putusan a quo, ternyata ditemukan bahwa tidak segala apa yang ada dan diketemukan di sidang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hal mana jelas telah menguntungkan posisi Terdakwa dan melemahkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

4. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan a quo. mencampuradukkan penipuan dari segi Hukum Perjanjian dengan penipuan dari segi Hukum Pidana, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang mendasar putusan a quo menjadi bias. Di satu sisi, Majelis Hakim malah menilai keabsahan perjanjian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHP (data vide alinea 1 halaman 67 Putusan), namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengabaikan fakta tentang adanya keadaan palsu sebelum perjanjian ditutup yaitu dengan memperjanjikan 7 (tujuh) bidang tanah yang dalam keadaan sengketa sehingga para Terdakwa dapat mengetahui dengan pasti dalam keadaan tersebut para Terdakwa tidak dapat berbuat bebas atas tanah tersebut sehingga dengan demikian unsur Pasal 378 yang bersifat alternatif menyangkut unsur “memakai nama palsu atau keadaan palsu. baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” yang dianggap oleh Majelis Hakim tidak terdapat dalam perkara a quo jelas

adalah kesalahan penerapan hukum karena secara nyata dengan diperjanjikannya 7 (tujuh) bidang tanah tersebut bukankah telah termasuk dalam keadaan palsu, hal mana telah pula sesuai dengan fakta yang terungkap dan keterangan saksi Chandra pada halaman 31 Putusan, yang menyatakan “Bahwa terhadap ke 7 bidang tanah tersebut, pada saat dibuat perjanjian penkatan jual beli dengan PT. Roda Mas Baja Inti, timah tersebut sedang dalam perkara dan pada tingkat banding, dan halaman 32 Putusan, SAKSI CHANDRA, SH. Menyatakan “...pada saat menandatangani saksi tidak sempat membentahukan bahwa tanah tersebut dalam keadaan sengketa”.

Bahwa Majelis Hakim tidak pul-a cermat dalam melihat adanya keterangan yang bertentangan antara keterangan TERDAKWA II dengan keterangan SAKSI CHANDRA, SH., dimana : Keterangan TERDAKWA II pada halaman 52 Putusan : “Bahwa TERDAKWA II tidak pernah dilaporkan oleh Saudara CHANDRA. SH, selaku Direktur Utama PT. Asindo mengenai adanya pembarteran tanah sebagai pembayaran 10% pembelian besi antara PT. Karunia Sejati dengan PT. Roda Mas Baja Inti...” dan “Bahwa TERDAKWA II mengetahui, bahwa tanah milik PT. Asindo dijadikan pembarteran untuk pembayaran 10% tersebut, nanti belakangan pada saat yang diperlihatkan oleh Penyidik”.

Keterangan SAKSI CHANDRA, SH. pada halaman 31 Putusan, menyatakan: “afas permintaan PT. Baca Mas Mulia Develoment kepada saksi, akhirnya selesai menyetujui membuat penkatan tersebut”.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 1 halaman 70 Putusan, yang menyatakan “tidak diketemukan adanya rangkaian kata-kata bohong, nama palsu atau keadaan palsu, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya”, jelas adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena jelas Terdakwa menggunakan KEADAAN PALSU, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ketika Terdakwa membuat atau menutup Perjanjian tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim ini justru bertentangan dengan pendapat J. Satrio yang dikutip oleh Majelis Hakim sendiri, yaitu unsur penipuan dalam suatu perjanjian haruslah dilihat pada proses kesepakatan itu dibuat, dan bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Faktanya, justru Majelis Hakim dalam pertimbangan pertimbangan dalam Putusan a quo menilai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat terjadinya wanprestasi, bukan pada proses kesepakatan itu dibuat.

5. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menilai bahwa tidak dilaksanakannya suatu perjanjian serta merta itu merupakan wanprestasi. Majelis Hakim harus

membedakan antara perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian (yang dikenal dengan wanprestasi) dengan perbuatan penipuan dengan cara menggunakan media perjanjian. Jelas bunyi Pasal 378 KUHP. menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya membenkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan..." Ini artinya, bahwa bukankah perbuatan membenkan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang, merupakan tindakan membuat kesepakatan/perjanjian? Namun dari bunyi Pasal 378 KUHP tersebut perlu dilihat bahwa apakah tindakan membenkan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang tersebut. yang notabene merupakan tindakan membuat kesepakatan/perjanjian, terdapat unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat.

Apabila dalam suatu tindakan membenkan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang. yang semuanya itu notabene merupakan tindakan membuat kesepakatan/perjanjian, terdapat unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maka jelas menurut ketentuan Pasal 378 KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Dengan demikian, tidak serta merta perjanjian tersebut identik dengan wanprestasi, karena apabila mengandung unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dalam proses kesepakatan itu dibuat, maka hal tersebut jelas merupakan suatu tindak pidana, bukan wanprestasi. Contohnya: ' dikatakan merupakan penipuan, jika Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang diketahuinya BERMASALAH/ BERSENGKETA, tapi justru oleh Terdakwa sengaja dijadikan sebagai obyek perjanjian, maka hal tersebut bukan merupakan wanprestasi. melainkan TINDAK PIDANA PENIPUAN, karena memenuhi unsur KEADAAN PALSU, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 2 halaman 72 Putusan, yang menyatakan apabila terjadi perselisihan akibat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan PT. RODA MAS BAJA INTI, harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, atau apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar (dalam konteks gugatan perdata). jelas pertimbangan ini tidak relevan dan tidak berdasar hukum untuk mendasari putusan perkara pidana a quo.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula keliru menafsirkan perjanjian jual beli No. : 147/RMBI/2004, tanggal 1

Desember 2004 sebagai dasar alasan pembena atau pembenaran atas tindakan para Terdakwa dalam melaksanakan perjanjian tersebut berupa pembayaran dengan menggunakan cek yang ternyata tidak ada dananya dan pembarteran atas 7 (tujuh) bidang tanah yang ternyata bersengketa adalah sebagai Konsekuensi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata oleh karena hal tersebut tidak berdasar hukum karena dalam menilai suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana Penipuan, Majelis Hakim tidak perlu berpatokan pada sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana Arrest Hogeraad dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981 halaman 200, W 10227 antara lain mengatakan bahwa : “ne: doet niet ter zake, of de aangegeene schuld een qeoorlodfe oorzak heeft. Voor de toepassing van 5r.326 doet de geldigheid der schuld naar burgerlijk recht met ter zake” yang artinya : Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah atau tidak.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula keliru dalam memaknai perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian yang sah karena berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana keterangan Ahli a de charge yang dihadirkan Terdakwa menegaskan adanya tindakan Terdakwa Ir. Frans Tunggono yang merupakan Direktur dari PT. Karunia Sejati yang telah bertindak melampaui batas wewenangannya dengan memperjanjikan hal-hal yang di luar batas kewenangannya yaitu memperjanjikan 7 (tujuh) bidang tanah yang merupakan tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama sehingga dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Bahwa kedua hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;

1.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah melampaui batas wewenangnya;

1. Selanjutnya, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan adanya permohonan dari Para Terdakwa maupun penerimaan konsignasi tersebut, karena hal-hal mengenai konsignasi adalah merupakan lingkup ranah hukum perdata, yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga sangat tidak berdasar hukum Majelis Hakim mencampuradukkan kedua hal tersebut, apalagi berkesimpulan bahwa penerimaan konsignasi tersebut merupakan hal yang menghapuskan tindak pidana. Jelas secara Hukum Pidana. adanya pembayaran utang secara mencicil ataupun yang ' dilakukan dengan cara konsignasi TIDAK menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi.

Pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 2 halaman 73 Putusan, yang menyatakan bahwa “dengan diterimanya sisa hutang sebagaimana Berita Acara No.01/Konsignasi/2011/PN.Kms, tertanggal 07 November 2011, maka perikatan yang timbul akibat perjanjian tertanggal 1 Desember 2004 menurut Pasal 1381 KUHPerdata menjadi hapus”, jelas pertimbangan yang tidak relevan dan tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim seharusnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ranah Hukum Perdata/Perjanjian, akan tetapi dalam perkara pidana a quo seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan terkait ranah hukum pidana. Di samping itu, Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangannya. Jika Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dari sisi hukum perdata/perjanjian dengan mengacu pada isi perjanjian, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa dengan diterimanya konsignasi tersebut maka utang dianggap lunas. jelas pertimbangan yang tidak konsisten dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri. Jika Majelis Hakim mengacu pada isi perjanjian,” maka pembayaran melalui konsignasi tersebut hanyalah pembayaran atas UTANG POKOK saja, bagaimana dengan denda keterlambatan 1,5% per bulan yang disyaratkan dalam perjanjian??? Majelis Hakim seharusnya memperhitungkan denda keterlambatan ini apabila mengacu pada isi perjanjian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah secara nyata melampaui batas wewenangnya; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami

uraikan di atas, kami berpendapat, apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dalam Tindak Pidana Penipuan” sebagaimana Dakwaan Pertama kami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

4. *Judex Facti* salah me'herapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yundis, yaitu Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi yang sebenarnya diketahui tanah-tanah tersebut dalam sengketa. Terdakwa tidak memberitahukan status yang sebenarnya dari tanah-tanah tersebut kepada David Gautama bahwa tanah-tanah tersebut dalam keadaan sengketa.
5. Terdakwa juga melakukan kebohongan lagi dengan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek tetapi tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup.
6. Terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan dengan menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro tetapi tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Rangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa telah / mengakibatkan kerugian bagi PT. RODAMAS BAJA INTI. sebesar Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya: Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa-putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Amar Putusan

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. John Lucman, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. John Lucman, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
 - a. No. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratusjuta rupiah);
 - b. No. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);
 - c. No. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratusjuta rupiah);
 - d. No. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu empat rupiah)
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT. Baja Mas Mulia Development No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah), dengan surat penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat perjanjian pembelian tanah NO.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli No. 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa : surat jalan, tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : C2-12.899.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Desember 1997;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy surat kepala kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 Nopember 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Analisis Penulis

Perbandingan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mempunyai perbedaan, secara garis besar adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat:

1. Terdakwa Menyerahkan ke 7 bidang tanah yang merupakan bagian dari pembayaran yang diperhitungkan sebagai cicilan dalam perjanjian jual beli.

2. Dengan diterimanya sisa hutang dan telah diterima baik oleh PT. Rodamas Baja inti sebagaimana Berita Acara nomor. 01 Konsignasi 2011/PN.Mks tertanggal 07 Novemver 2011 tersebut diatas, maka perikatan yang timbul perjanjian tertanggal 1 Desember 2004 menurut Pasal 1381 KUH perdata menjadi dihapus.
3. Terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II Jhon Lucman yang waktu itu tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya (wanprestasi), dan dilain pihak PT. Rodamas Baja Inti juga tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh yaitu ada sisa besi yang tidak dikirim senilai Rp.1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam lapangan hukum perdata.
4. Oleh karena perbuatan Terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II Jhon Lucman bukan merupakan perbuatan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa I Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II Jhon Lucman haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechts Vervolging).

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

1. Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi yang sebenarnya diketahui bahwa tanah-tanah tersebut dalam sengketa. Terdakwa tidak memberitahukan status tanah tersebut kepada David Gautama bahwa tanah tersebut dalam sengketa.
2. Terdakwa juga melakukan kebohongan lagi dengan menyerahkan 3 (lembar) cek tetapi tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup.
3. Terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan dengan menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro tetapi tidak dapat dicairkan karena tidak adadanya.
4. Rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. RODAMAS BAJA INTI, sebesar Rp.29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah).

Setelah memperhatikan amar putusan kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 871 K/Pid/2012 dan membandingkannya dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks terlihat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta dalam tindak pidana penipuan sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian antar saksi, keterangan saksi ahli, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Setelah dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nathan Lambe, S.H, M.H pada tanggal 4 Januari 2015, beliau berpendapat bahwa:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah lalai dalam menjatuhkan putusan karena tidak mempertimbangkan Pasal 378 KUHP. Dalam unsur Pasal 378 KUHP terdapat unsur “rangkaian kata-kata bohong” namun tidak dipertimbangkan sehingga lalai dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan adanya perjanjian (kontrak) yang dibuat sehingga delik yang dilakukan adalah suatu perkara keperdataan. Dalam putusan kasasi majelis hakim mempertimbangkan rangkaian kata-kata bohong, kerugian oleh korban dan keterangan saksi ahli, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan pidana penuntut umum,

ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta mempertimbangkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana penipuan dan divonis 3 tahun penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*) tidak tepat dan keliru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan secara baik dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memahami unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga mencampuradukkan penipuan dari segi hukum perjanjian (perdata) dengan penipuan dari segi hukum pidana dan keliru menjadikan perjanjian (perdata) sebagai suatu perikatan yang dibangun pelaku dan korban sebagai alasan pembenar. Selain itu fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti yang ada, serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, keliru dan terburu-buru dalam memutus.

2. Dalam putusan kasasi No. 871 K/Pid/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dan memutus Terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaka Penuntut Umum, secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana penipuan. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal 378 KUHP “rangkaiaan kata-kata bohong” yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kerugian yang dialami oleh PT. Rodamas Baja Inti. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi ahli, alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan.

2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan, maka diharapkan pula hakim dalam memutus perkaranya agar lebih berhati-hati, dengan memahami unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa, memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi ahli, alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Hakim pun harus berhati-hati dalam memutus suatu perkara dengan memahami hukum lebih dalam karena ditangan Hakim-lah tercipta ketetapan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya hakim agar tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku tindak pidana agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nuansa Media, Bandung.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ 2003, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemar Seno Aji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- P.A.F Lamintang, 1986, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kedua, Armico, Bandung.

2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 1982, Penerbit:Simplex Jakarta, Jakarta.

Sumber Dari Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas->.

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum